

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ISLAM DALAM
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI JAWA
TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

TAHTA ROHMA SABILAH

NIM 08040422182



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2026

PERNYATAAN

Saya, Tahta Rohma Sabilah, 08040422182, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 29 April 2026



Tahta Rohma Sabilah

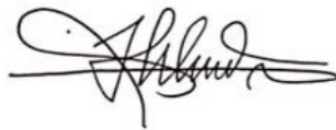
NIM 08040422182

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 30 April 2026

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Hakim', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.

NIP. 197008042005011003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ISLAM DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI JAWA TIMUR

Oleh:

Tahta Rohma Sabilah

NIM: 08040422182

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Mei 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.

NIP. 197008042005011003

(Penguji 1)

2. Dr. Sri Wigati, M.E.I

NIP. 197302212009122001

(Penguji 2)

3. Dr. M. Luthfillah Habibi, SEI, MSA, Ak.

NIP. 198101222023211008

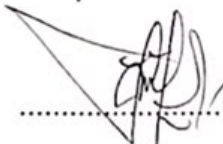
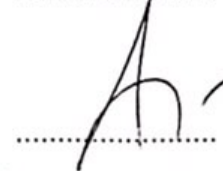
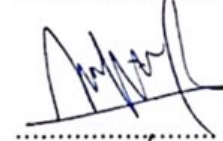
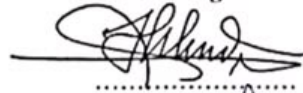
(Penguji 3)

4. Nurul Fatma Hasan, S.Si., M.E.I

NIP. 198907112020122013

(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 02 Juni 2026

Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TAHTA ROHMA SABILAH
NIM : 08040422182
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : tahtarohma25324@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ISLAM DALAM PENGELOLAAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juli 2026

Penulis

(Tahta Rohma Sabilah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang berperan dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan PAD terbesar di Indonesia dituntut untuk mengelola PAD secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Timur serta kesesuaiannya dengan perspektif kebijakan publik Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat BAPENDA Provinsi Jawa Timur dan akademisi kebijakan publik Islam. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Timur telah berjalan cukup baik. Hingga Semester I Tahun 2025, realisasi PAD mencapai Rp8,57 triliun atau 50,14% dari target Rp17,10 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah. Pengelolaan PAD didukung oleh koordinasi kelembagaan, sistem MONIPAD, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dalam perspektif kebijakan publik Islam, pengelolaan PAD telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, amanah, transparansi, dan efisiensi melalui pemanfaatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan kinerja yang relatif baik dan sejalan dengan sebagian besar prinsip kebijakan publik Islam. Namun, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan pemerataan pembangunan, memperkuat integritas pengelolaan anggaran, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara lebih merata.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan Publik, Kebijakan Publik Islam, Kemaslahatan, Transparansi, Keadilan.

ABSTRACT

Local Own-Source Revenue (PAD) is the primary source of funding for regional development and plays a role in supporting the fiscal autonomy of local governments. As one of the regions with the highest PAD in Indonesia, East Java Province is required to manage its PAD effectively, transparently, and with a focus on public welfare. This study aims to analyze the implementation of PAD management policies in East Java Province and their alignment with the Islamic public policy perspective.

This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Informants included officials from the East Java Provincial Revenue Agency (BAPENDA) and scholars of Islamic public policy. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions, with validity testing conducted using source triangulation.

The results indicate that the implementation of local revenue management policies in East Java Province has proceeded fairly well. As of the first semester of 2025, local revenue realization reached Rp8.57 trillion, or 50.14% of the target of Rp17.10 trillion, with the largest contribution coming from local taxes. PAD management is supported by institutional coordination, the MONIPAD system, and tax intensification and extensification strategies. From an Islamic public policy perspective, PAD management has reflected the principles of public interest, trustworthiness, transparency, and efficiency through the allocation of funds for infrastructure development and public services.

This study concludes that the management of Local Own-Source Revenue (PAD) in East Java Province has demonstrated relatively good performance and is in line with most principles of Islamic public policy. However, local governments still need to improve the equitable distribution of development, strengthen the integrity of budget management, and optimize public participation in policy oversight in order to achieve public welfare and social justice more equitably.

Keywords: Local Revenue (PAD), Public Policy, Islamic Public Policy, Public Welfare, Transparency, Justice.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Kebijakan Publik Islam	11
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik Islam.....	11
2.1.2 Indikator Kebijakan Publik Islam.....	14
2.2 Konsep Dasar Kebijakan Publik	17
2.3 Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
2.3.1 Fungsi Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
2.4 Penelitian Terdahulu.....	22
2.5 Kerangka Pemikiran Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian	31
3.2.1 Lokasi Penelitian	31
3.2.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Analisis Data	36
3.5.1 Analisis Data.....	36
3.5.2 Uji Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1 Profil Provinsi Jawa Timur	39
4.1.2 Dasar Hukum Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur	42
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur	46
4.2.2 Implementasi Kebijakan Pengelolaan PAD dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam di Provinsi Jawa Timur	54
4.3 Pembahasan	60
4.3.1 Analisis Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Timur	60
4.3.2 Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan PAD dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Sumber Data	32
Tabel 4. 1 Realisasi PAD Provinsi Jawa Timur s.d Juni 2025.....	47



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Konseptual	30
Gambar 4. 1 Provinsi Jawa Timur	39



DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Mei 2025*.
Bank Indonesia Bicara.
[https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-
Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2025.aspx?utm_source=chatgpt.com](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2025.aspx?utm_source=chatgpt.com)
- Bapenda Jatim. (2024). *BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN KINERJA 2024*.
[https://sakip.dipendajetim.go.id/upload/SAKIP_2024/LAPORAN KINERJA
2024.pdf](https://sakip.dipendajetim.go.id/upload/SAKIP_2024/LAPORAN_KINERJA_2024.pdf)
- DJPk Kemenkeu. (2025). *apbd @ djpk.kemenkeu.go.id*.
[https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?pemda=00&periode=6&provinsi
i=13&tahun=2025&utm_source=chatgpt.com](https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?pemda=00&periode=6&provinsi=13&tahun=2025&utm_source=chatgpt.com)
- Fitria, V., Salsabila, S., & Marlina, L. (2025). Konsep Keuangan Publik Islam Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Berbasis Zakat di Indonesia. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 152–164.
- Indonesia. (2022). *Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Duta Nasindo Semarang.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- JATIM, B. (n.d.). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024*. 28 February 2024. Retrieved February 25, 2026, from jatim.bps.go.id.
- Kemenag. (2022). *An-Nahl 16 : 90*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2019). Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel The Urgency of the Implementation of the Cashless Government System in Building a Transparent and Accountable Bureaucracy. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 136–150.
- Muharam, S., Risvandi, R., Andri, A., Ramadhanti, R., Emharis, E., & others.

- (2023). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PANDANGAN ISLAM. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 134–140.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1980). Public finance in theory and practice. (No Title).
- Rahmani, D. A., Muhayati, S., & Kholis, I. (2025). Analisis data kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13037–13048.
- Saini, S., & Hasan, Z. (2025). *Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam*.
- Setyaningsih, A. (2009). *Evaluasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sukayat, T. (2015). Internalisasi Nilai Islam melalui Kebijakan Publik (Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis). *Jurnal Dakwah*, 16(1), 79–102.
- Sulistiyo, U., & others. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang, R. I. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Wong, S. Y., Susilawati, C., Miller, W., & Mardiasmo, D. (2018). Improving information gathering and distribution on sustainability features in the Australian residential property market. *Journal of Cleaner Production*, 184, 342–352.